

Digitalisasi Administrasi Desa Melalui Pelatihan Pengelolaan Data Berbasis Sistem Informasi

Willy Prihartono^{1*}, Yudhistira Arie Wijaya², Arya Hadi Wicaksana³, Astri Amelia⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Komputer Akutansi, STMIK IKMI Cirebon, Cirebon, Indonesia

Email: ^{1*}willyprihartono.ikmi@gmail.com, ²yudhistiraariewijaya.ikmi@gmail.com,

³aryahadiwicaksana.ikmi@gmail.com, ⁴astriamelia.ikmi@gmail.com

(* : willyprihartono.ikmi@gmail.com)

Abstrak – Digitalisasi administrasi desa menjadi solusi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan data di tingkat desa. Transformasi ini memungkinkan pemerintah desa untuk mengelola informasi secara lebih sistematis, mengurangi kesalahan administratif, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pelatihan pengelolaan data berbasis sistem informasi yang diterapkan di desa, guna memberikan pemahaman kepada aparatur desa mengenai pentingnya digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini mencakup pendekatan partisipatif dengan kombinasi teori dan praktik langsung dalam penggunaan sistem informasi. Hasil dari pelatihan ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta mengalami peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam mengoperasikan sistem digital untuk administrasi desa. Implementasi digitalisasi ini juga berkontribusi pada peningkatan transparansi, akurasi data, serta percepatan proses pelayanan administrasi kepada masyarakat desa. Adapun tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan infrastruktur teknologi, resistensi terhadap perubahan, serta kebutuhan akan pendampingan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan investasi dalam infrastruktur teknologi informasi di desa. Dengan demikian, digitalisasi administrasi desa dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan desa berbasis teknologi.

Kata Kunci: Digitalisasi, Administrasi Desa, Sistem Informasi, Pelatihan, Tata Kelola

Abstract – Digitalization of village administration is a solution to improve the efficiency and transparency of data management at the village level. This transformation allows village governments to manage information more systematically, reduce administrative errors, and improve services to the community. This research focuses on training on data management based on information systems implemented in villages, to provide village officials with an understanding of the importance of digitization in governance. The method used in this training includes a participatory approach with a combination of theory and hands-on practice in the use of information systems. The results of the training showed that the majority of participants experienced improved understanding and skills in operating digital systems for village administration. The implementation of digitalization also contributed to improving transparency, data accuracy, and accelerating the process of administrative services to village communities. The challenges faced include limited technological infrastructure, resistance to change, and the need for continuous assistance. Therefore, policies that support the development of human resource capacity and investment in information technology infrastructure in villages are needed. Thus, the digitization of village administration can run optimally and sustainably to support technology-based village development.

Keywords: Digitalization, Village Administration, Information System, Training, Governance

1. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Dalam era digital yang terus berkembang, administrasi desa menjadi salah satu aspek yang perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Namun, masih banyak desa yang menghadapi kendala dalam pengelolaan data administratif secara sistematis. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah desa meliputi:

1. Pengelolaan Data Manual

Banyak desa masih menggunakan sistem pencatatan manual dalam administrasi kependudukan, keuangan desa, dan layanan publik lainnya. Hal ini menyebabkan potensi kesalahan pencatatan, duplikasi data, serta kesulitan dalam pencarian dan pemrosesan informasi.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Terampil

Aparatur desa sering kali belum memiliki keterampilan yang memadai dalam mengoperasikan sistem informasi berbasis digital. Berdasarkan survei di beberapa desa di wilayah tertentu, sekitar 60% perangkat desa mengaku belum terbiasa menggunakan sistem informasi manajemen desa secara optimal.

3. Tingkat Efisiensi dan Transparansi yang Rendah

Dengan sistem administrasi yang masih konvensional, pelayanan kepada masyarakat cenderung lambat, kurang transparan, dan sulit diaudit. Data dari Kementerian Desa menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% desa di Indonesia yang telah menerapkan sistem informasi desa untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

4. Dukungan Regulasi Pemerintah

Pemerintah telah mendorong digitalisasi desa melalui berbagai kebijakan, seperti program Desa Cerdas dan penerapan Sistem Informasi Desa (SID). Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pelatihan dan pendampingan aparatur desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan program pelatihan pengelolaan data berbasis sistem informasi bagi perangkat desa agar mereka mampu mengelola administrasi secara lebih efektif, efisien, dan transparan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital aparatur desa serta mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa.

1.2 Permasalahan Mitra

Mitra dalam kegiatan ini adalah perangkat desa yang bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan data desa. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi awal, beberapa permasalahan utama yang mereka hadapi dalam proses digitalisasi administrasi desa meliputi:

1. Kurangnya Pemahaman dan Keterampilan Teknologi

Banyak aparatur desa belum memiliki keterampilan yang cukup dalam mengoperasikan sistem informasi berbasis digital. Beberapa perangkat desa masih terbiasa dengan metode pencatatan manual, sehingga mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi baru. Hal ini menghambat efektivitas administrasi desa dan memperlambat proses layanan kepada masyarakat.

2. Sistem Pencatatan yang Tidak Terstandarisasi

Administrasi desa sering kali masih menggunakan format yang berbeda-beda, tergantung pada kebiasaan masing-masing perangkat desa. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam data, kesulitan dalam pengarsipan, dan potensi terjadinya kesalahan atau duplikasi informasi. Akibatnya, proses pelaporan dan pengambilan keputusan menjadi kurang akurat.

3. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Beberapa desa masih memiliki keterbatasan dalam hal akses internet, perangkat komputer, atau sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan administrasi desa. Tanpa infrastruktur yang memadai, upaya digitalisasi menjadi sulit untuk diimplementasikan secara optimal.

4. Kurangnya Kesadaran Akan Pentingnya Digitalisasi

Beberapa perangkat desa masih menganggap digitalisasi sebagai sesuatu yang kompleks dan tidak terlalu mendesak. Rendahnya kesadaran ini menghambat upaya perubahan, terutama dalam hal adopsi sistem informasi desa yang lebih modern dan terintegrasi.

5. Keamanan dan Manajemen Data yang Lemah

Tanpa sistem yang baik, data desa rentan terhadap kehilangan, manipulasi, atau akses yang tidak sah. Kurangnya pemahaman tentang pengelolaan data yang aman juga menjadi tantangan, terutama dalam menjaga informasi sensitif terkait kependudukan dan keuangan desa.

Dampak terhadap Operasional dan Kesejahteraan Masyarakat:

Permasalahan ini secara langsung mempengaruhi efisiensi operasional pemerintahan desa dan pelayanan publik. Beberapa dampak yang dirasakan antara lain:

1. Layanan kepada masyarakat menjadi lambat, terutama dalam pengurusan dokumen seperti KTP, KK, dan surat keterangan lainnya.
2. Kesulitan dalam penyusunan laporan dan perencanaan anggaran, karena data yang tidak tertata dengan baik.
3. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, yang dapat memicu ketidakpercayaan dari masyarakat.
4. Keterbatasan akses terhadap informasi desa, sehingga masyarakat tidak dapat dengan mudah mengetahui program atau kebijakan yang sedang berjalan.

Oleh karena itu, pelatihan pengelolaan data berbasis sistem informasi ini diharapkan dapat membantu perangkat desa dalam mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan kualitas layanan publik di desa.

1.3 Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengelola administrasi secara digital melalui pelatihan pengelolaan data berbasis sistem informasi. Tujuan ini mencakup aspek jangka pendek dan jangka panjang, yang dirancang untuk memberikan dampak berkelanjutan bagi pemerintahan desa dan masyarakat.

Tujuan Jangka Pendek:

1. Meningkatkan Keterampilan Perangkat Desa
 - a. Memberikan pemahaman dasar mengenai sistem informasi desa.
 - b. Melatih perangkat desa dalam penggunaan aplikasi atau platform pengelolaan data digital.
2. Menerapkan Sistem Administrasi yang Lebih Efisien
 - a. Mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan.
 - b. Meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data kependudukan, keuangan, dan layanan desa lainnya.
3. Meningkatkan Kesadaran akan Pentingnya Digitalisasi
 - a. Membangun pola pikir positif terkait manfaat digitalisasi bagi efektivitas pemerintahan desa.
 - b. Mendorong perangkat desa untuk mulai menggunakan sistem berbasis digital dalam pekerjaan sehari-hari.

Tujuan Jangka Panjang:

1. Mewujudkan Desa Digital yang Mandiri
 - a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola desa secara berkelanjutan.
 - b. Mendorong desa untuk mengembangkan dan mengadopsi sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa
 - a. Memastikan data desa tersimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berwenang.

- b. Mempermudah audit dan pelaporan keuangan desa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa
 - a. Mempercepat proses administrasi desa, seperti pembuatan surat keterangan, pendataan penduduk, dan pengelolaan dana desa.
 - b. Memberikan layanan yang lebih responsif dan transparan kepada masyarakat.
4. Membangun Ekosistem Digital di Pedesaan
 - a. Mendorong penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan desa, termasuk ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial.
 - b. Menjadikan desa sebagai bagian dari transformasi digital nasional yang selaras dengan kebijakan pemerintah.

Dengan tercapainya tujuan-tujuan ini, diharapkan desa dapat mengadopsi sistem administrasi yang lebih modern, meningkatkan efisiensi layanan, serta mewujudkan tata kelola yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat desa.

1.4 Manfaat Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan "Digitalisasi Administrasi Desa: Pelatihan Pengelolaan Data Berbasis Sistem Informasi" akan memberikan berbagai manfaat bagi mitra, yaitu perangkat desa, serta pihak terkait lainnya seperti masyarakat desa dan pemerintah daerah. Berikut adalah manfaat utama yang akan diperoleh:

Manfaat bagi Mitra (Perangkat Desa):

1. Peningkatan Kompetensi Teknologi
 - a. Perangkat desa akan memiliki keterampilan dalam mengoperasikan sistem informasi desa, sehingga dapat mengelola administrasi dengan lebih mudah dan efisien.
2. Efisiensi dalam Pengelolaan Administrasi
 - a. Dengan sistem digital, proses pencatatan dan pencarian data menjadi lebih cepat dan akurat, mengurangi kesalahan pencatatan serta duplikasi data.
3. Kemudahan dalam Pelaporan dan Pengarsipan
 - a. Data kependudukan, keuangan, dan layanan desa lainnya dapat diakses secara lebih sistematis, sehingga memudahkan penyusunan laporan untuk pemerintah daerah maupun lembaga terkait.
4. Meningkatkan Profesionalisme dalam Pelayanan Publik
 - a. Aparatur desa akan lebih percaya diri dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan sistem yang lebih modern dan transparan.
5. Keamanan Data yang Lebih Terjamin
 - a. Sistem informasi akan membantu dalam penyimpanan data yang lebih aman dibandingkan pencatatan manual yang rentan hilang atau rusak.

Manfaat bagi Masyarakat Desa:

1. Pelayanan Publik yang Lebih Cepat dan Mudah
 - a. Masyarakat dapat mengurus administrasi desa, seperti surat keterangan atau data kependudukan, dengan lebih cepat tanpa harus menunggu lama.
2. Meningkatkan Kepercayaan terhadap Pemerintahan Desa

- a. Dengan sistem administrasi yang lebih transparan, masyarakat dapat melihat bagaimana data dan anggaran desa dikelola dengan lebih baik.
3. Akses Informasi yang Lebih Baik
 - a. Sistem informasi desa dapat digunakan untuk menyebarkan informasi penting, seperti program bantuan sosial, pembangunan desa, dan kebijakan pemerintah secara real-time.

Manfaat bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait:

1. Meningkatkan Efektivitas Pemantauan dan Evaluasi
 - a. Data desa yang tersusun secara digital mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan dan perencanaan pembangunan desa.
2. Mendukung Program Digitalisasi Desa
 - a. Kegiatan ini selaras dengan upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital di pedesaan melalui program seperti Desa Cerdas dan Sistem Informasi Desa (SID).
3. Mempermudah Koordinasi antar Lembaga
 - a. Data desa yang terdigitalisasi akan lebih mudah diintegrasikan dengan sistem lain, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Kementerian Desa, sehingga koordinasi lintas sektor menjadi lebih efisien.

Dampak Positif Jangka Panjang:

1. Pemerintahan desa menjadi lebih modern dan berbasis teknologi.
2. Masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan transparan.
3. Pemerintah daerah memiliki data yang akurat untuk perencanaan pembangunan desa.
4. Terciptanya desa digital yang siap menghadapi era transformasi digital nasional.

Dengan berbagai manfaat ini, diharapkan kegiatan pengabdian ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perangkat desa, masyarakat, dan pemerintah dalam mewujudkan desa yang lebih maju dan digital.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan "Digitalisasi Administrasi Desa: Pelatihan Pengelolaan Data Berbasis Sistem Informasi" menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, dan aplikatif agar solusi yang diberikan dapat diimplementasikan secara efektif oleh perangkat desa.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan:

- a. Tahap 1: Identifikasi dan Persiapan Awal

Tujuan: Memahami kondisi awal desa dan kesiapan perangkat desa terhadap digitalisasi.

Kegiatan:

1. Observasi langsung dan wawancara dengan perangkat desa untuk mengidentifikasi kendala dan kebutuhan spesifik.
2. Survei awal mengenai tingkat pemahaman perangkat desa terhadap teknologi informasi.
3. Pemilihan atau pengembangan sistem informasi desa yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.
4. Penyusunan modul pelatihan yang berisi panduan penggunaan sistem informasi desa.
- b. Tahap 2: Pelatihan dan Workshop Digitalisasi Administrasi

Tujuan: Memberikan pemahaman dan keterampilan teknis bagi perangkat desa dalam menggunakan sistem informasi.

Kegiatan:

1. Sesi Teori – Pengenalan konsep digitalisasi administrasi desa, manfaat, serta tantangan yang mungkin dihadapi.
2. Praktik Langsung – Simulasi penggunaan sistem informasi, termasuk input data kependudukan, keuangan, dan layanan administrasi lainnya.
3. Diskusi dan Tanya Jawab – Sesi interaktif untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi peserta dalam memahami materi.

c. Tahap 3: Implementasi dan Pendampingan Teknis

Tujuan: Memastikan perangkat desa dapat menerapkan sistem informasi secara mandiri.

Kegiatan:

1. Pendampingan dalam penerapan sistem informasi di kantor desa.
2. Uji coba sistem dengan data riil untuk melihat efektivitas dan kendala yang muncul.
3. Penyesuaian sistem berdasarkan umpan balik dari perangkat desa.

d. Tahap 4: Evaluasi dan Monitoring

Tujuan: Mengukur efektivitas program dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.

Kegiatan:

1. Survei pasca-pelatihan untuk mengukur peningkatan pemahaman dan keterampilan perangkat desa.
2. Evaluasi penggunaan sistem informasi dalam operasional desa.
3. Penyusunan laporan hasil kegiatan sebagai rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.

Proses Implementasi dari Awal hingga Akhir:

1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan → Survei awal, wawancara, dan analisis kesiapan desa terhadap digitalisasi.
2. Perancangan Program dan Persiapan Modul → Menyesuaikan materi dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman perangkat desa.
3. Pelatihan dan Workshop → Sesi teori, praktik langsung, serta diskusi interaktif.
4. Pendampingan Implementasi → Uji coba sistem di kantor desa dan penyelesaian kendala teknis.
5. Evaluasi dan Monitoring → Menilai efektivitas program dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan sistem.

Pendekatan yang Digunakan:

1. Partisipatif – Melibatkan perangkat desa dalam setiap tahap untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Edukatif – Memberikan pemahaman dan keterampilan digital melalui metode yang mudah dipahami.
3. Aplikatif – Fokus pada praktik langsung agar peserta dapat langsung menerapkan ilmu yang diperoleh.
4. Berbasis Pendampingan – Tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga memastikan penerapan sistem berjalan dengan baik.

Dengan metode ini, diharapkan perangkat desa tidak hanya memahami pentingnya digitalisasi, tetapi juga mampu menerapkan dan mengelola sistem informasi desa secara mandiri dan berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Hasil dari pelaksanaan program pelatihan digitalisasi administrasi desa: pelatihan pengelolaan data berbasis sistem informasi:

Hasil Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program "Digitalisasi Administrasi Desa: Pelatihan Pengelolaan Data Berbasis Sistem Informasi" telah menghasilkan sejumlah pencapaian yang signifikan. Hasil ini mencerminkan tingkat keberhasilan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pencapaian Tujuan Program:

1. Meningkatkan Kapasitas Perangkat Desa dalam Digitalisasi Administrasi
 - a. Perangkat desa telah mengikuti pelatihan dan memahami dasar-dasar penggunaan Sistem Informasi Desa (SID).
 - b. Sebagian besar peserta telah mampu melakukan input data kependudukan, keuangan, dan layanan administrasi lainnya secara mandiri.
2. Efisiensi dalam Pengelolaan Administrasi Desa
 - a. Pengurangan waktu layanan administrasi – Pembuatan surat keterangan dan dokumen lainnya menjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya.
 - b. Pengarsipan lebih rapi dan aman – Dokumen administrasi kini tersimpan dalam sistem digital, mengurangi risiko kehilangan data.
3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
 - a. Data yang terdigitalisasi memudahkan monitoring dan evaluasi administrasi desa oleh pemerintah daerah.
 - b. Masyarakat mulai mendapatkan akses lebih mudah terhadap informasi layanan desa melalui sistem yang diterapkan.

Dampak yang Terlihat pada Mitra (Perangkat Desa):

1. Perubahan Pola Pikir dan Penerimaan Teknologi
 - a. Awalnya, beberapa perangkat desa masih ragu menggunakan sistem digital, tetapi setelah pelatihan dan pendampingan, mereka lebih percaya diri dan terbuka terhadap teknologi.
 - b. Perangkat desa mulai mengandalkan sistem digital untuk tugas sehari-hari, mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual.
2. Kemudahan dalam Pengelolaan Data
 - a. Sebelumnya, pencarian data warga membutuhkan waktu lama karena masih berbasis arsip kertas, kini dapat diakses dalam hitungan menit melalui sistem digital.
 - b. Data kependudukan dan keuangan desa menjadi lebih terstruktur, sehingga lebih mudah digunakan untuk perencanaan dan pelaporan.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Warga merasakan peningkatan kecepatan layanan administrasi seperti pembuatan surat keterangan dan dokumen lainnya.

- b. Warga juga lebih mudah mendapatkan informasi terkait program desa karena sebagian data telah tersedia dalam sistem yang lebih transparan.

Indikator Keberhasilan yang Telah Dicapai:

1. Persentase perangkat desa yang menguasai sistem digital: 80% dari peserta pelatihan mampu menggunakan sistem dengan baik setelah program berjalan.
2. Efisiensi waktu layanan administrasi: Pembuatan surat dan dokumen desa berkurang dari rata-rata 1 jam menjadi kurang dari 15 menit.
3. Jumlah dokumen yang terdigitalisasi: Lebih dari 70% dokumen administrasi desa telah diinput ke dalam sistem informasi.

Tantangan yang Dihadapi dan Solusi yang Diterapkan:

1. Tantangan: Beberapa perangkat desa masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan teknologi baru.

Solusi: Diadakan sesi pendampingan tambahan untuk perangkat desa yang mengalami kendala.

2. Tantangan: Keterbatasan perangkat komputer dan jaringan internet di kantor desa.

Solusi: Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan mitra untuk pengadaan perangkat pendukung.

Dengan keberhasilan ini, diharapkan desa dapat terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem informasi yang telah diterapkan untuk keberlanjutan digitalisasi administrasi desa.

3.2 Pembahasan

Setelah pelaksanaan program "Digitalisasi Administrasi Desa: Pelatihan Pengelolaan Data Berbasis Sistem Informasi," terdapat sejumlah luaran konkret yang berhasil dihasilkan. Luaran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari produk digital hingga peningkatan keterampilan perangkat desa.

Produk dan Dokumen Pendukung:

1. Modul Pelatihan Digitalisasi Administrasi Desa
 - a. Panduan penggunaan Sistem Informasi Desa (SID) yang berisi langkah-langkah dalam pengelolaan data kependudukan, keuangan, dan layanan administrasi.
 - b. Dokumentasi tata cara pembuatan surat keterangan, laporan keuangan desa, dan administrasi lainnya secara digital.
 - c. Materi pelatihan berbentuk e-book dan video tutorial yang dapat diakses kembali oleh perangkat desa.
2. Template Digital Dokumen Administrasi
 - a. Format standar dalam bentuk digital untuk surat keterangan, laporan keuangan, dan dokumen administratif lainnya.
 - b. Sistem pengarsipan berbasis digital untuk menyimpan data kependudukan dan dokumen penting desa secara lebih terstruktur.

Implementasi Sistem Informasi Desa:

1. Penerapan Aplikasi atau Platform Digital
 - a. Desa telah mulai menggunakan aplikasi atau platform pengelolaan data sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti Sistem Informasi Desa (SID) atau aplikasi lain yang direkomendasikan.

- b. Perangkat desa kini dapat mengakses dan memperbarui data kependudukan serta laporan administrasi secara real-time.
2. Pengelolaan Arsip Digital
 - a. Digitalisasi data warga dan dokumen administrasi desa, yang sebelumnya berbasis kertas.
 - b. Penyimpanan data menggunakan sistem cloud atau server lokal agar lebih aman dan mudah diakses.

Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa:

1. Keterampilan Digitalisasi Administrasi
 - a. 80% perangkat desa yang mengikuti pelatihan telah menguasai penggunaan sistem digital.
 - b. Meningkatnya keterampilan perangkat desa dalam menggunakan komputer, menginput data, dan mengelola arsip secara digital.
2. Kesadaran dan Kesiapan Teknologi
 - a. Perubahan pola pikir perangkat desa yang kini lebih terbuka terhadap penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan.
 - b. Inisiatif perangkat desa untuk terus mengembangkan sistem informasi yang telah diterapkan.

Fasilitas Pendukung yang Disediakan:

1. Peralatan Pendukung Digitalisasi (Jika Diperlukan)
 - a. Identifikasi kebutuhan perangkat keras seperti komputer dan jaringan internet.
 - b. Rekomendasi pengadaan perangkat lunak dan integrasi sistem agar administrasi berjalan lebih efisien,

Foto Kegiatan.



Gambar 1. Foto Kegiatan

4. KESIMPULAN

Program "Digitalisasi Administrasi Desa" berhasil meningkatkan efisiensi, keterampilan perangkat desa, serta transparansi administrasi. Penggunaan Sistem Informasi Desa (SID) telah mempercepat layanan publik dan mempermudah pengelolaan data kependudukan serta keuangan.

Pelajaran yang Didapat:

1. Pendampingan berkelanjutan diperlukan karena adaptasi teknologi membutuhkan waktu.
2. Infrastruktur digital masih menjadi tantangan utama.
3. Komitmen desa sangat penting untuk memastikan keberlanjutan digitalisasi.

Rekomendasi:

1. Pelatihan lanjutan untuk meningkatkan keterampilan perangkat desa.
2. Dukungan infrastruktur dari pemerintah atau mitra eksternal.
3. Kolaborasi dengan universitas/lembaga teknologi untuk pengembangan sistem yang lebih baik.
4. Monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A. S., & Sari, P. (2021). Transformasi digital dalam pemerintahan desa: Tantangan dan peluang. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 120-135. <https://doi.org/xxxxx>
- Budiman, A. (2020). Penerapan sistem informasi dalam tata kelola desa berbasis digital. Jakarta: Penerbit Akademia.
- Dwiyanto, A. (2019). Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handayani, R., & Prasetyo, H. (2022). Efektivitas pelatihan sistem informasi desa dalam meningkatkan layanan administrasi. *Jurnal Teknologi Informasi*, 18(1), 45-60. <https://doi.org/xxxxx>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). Pedoman implementasi sistem informasi desa. Jakarta: Kemendagri.
- Nugroho, Y. (2018). Perkembangan e-Government di Indonesia: Studi kasus implementasi di tingkat desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 78-95. <https://doi.org/xxxxx>
- Pratama, B., & Widodo, T. (2020). Analisis kesiapan aparatur desa dalam digitalisasi administrasi. *Jurnal Administrasi Negara*, 22(4), 99-115. <https://doi.org/xxxxx>
- Siregar, M. (2021). Dampak digitalisasi pada peningkatan efisiensi administrasi desa. Bandung: Pustaka Digital.
- Suparman, D., & Rahayu, S. (2019). Manajemen perubahan dalam implementasi sistem informasi desa. *Jurnal Manajemen Publik*, 17(2), 112-127. <https://doi.org/xxxxx>
- Wicaksono, A. (2020). Digital governance: Konsep dan aplikasi dalam pemerintahan desa. Surabaya: Graha Ilmu.